

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,400, dengan t-statistik 2,988 > 1,96 dan $p = 0,003 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa, seperti pemahaman tugas, keterampilan teknis, dan pengalaman kerja, maka semakin besar pula kemampuannya dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Transparansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,307, dengan t-statistik 2,306 > 1,96 dan $p = 0,021 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, akses publik terhadap laporan keuangan, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan mampu menekan risiko penyimpangan dana dan memperkuat sistem kontrol sosial di desa.

3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Nilai koefisien jalur sebesar 0,236, dengan t-statistik $2,164 > 1,96$ dan $p = 0,031 < 0,05$, menunjukkan bahwa semakin besar rasa tanggung jawab aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, maka semakin tinggi pula efektivitas dalam mencegah praktik-praktik penyimpangan.
4. Kompetensi aparatur desa, transparansi keuangan, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R-square sebesar 0,609, yang berarti ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 60,9% variasi pencegahan fraud, sedangkan sisanya sebesar 39,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil ini membuktikan bahwa ketiga faktor tersebut merupakan elemen kunci dalam membangun sistem tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, sehingga penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Arse sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas lingkup penelitian ke seluruh kecamatan atau memilih beberapa kecamatan sebagai sampel perwakilan. Dengan cakupan yang lebih luas, analisis pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa akan lebih representatif dan komprehensif, serta mampu

memperkuat pengujian pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi keuangan, dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Instrumen penelitian dalam skripsi ini masih terbatas pada kuesioner yang disebarkan kepada aparatur desa, sehingga data yang diperoleh hanya mencerminkan sudut pandang internal perangkat desa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias karena responden yang mengisi kuesioner juga merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan metode dengan melibatkan perspektif eksternal, seperti inspektorat atau lembaga pengawas desa, melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Selain itu, penelitian berikut juga sebaiknya melengkapi instrumen dengan penggunaan laporan keuangan desa atau dokumen pendukung lainnya sebagai data sekunder.

3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel utama, sementara masih terdapat 39,1% faktor lain yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti sistem pengendalian internal dan budaya organisasi agar analisis lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga dari mekanisme pengawasan serta nilai etis yang melekat dalam organisasi.